

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Edhy, S. (2003). Sistem Informasi Manajemen. *Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.*

Keban Yeremias, T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik
(Concept, Theory and Issue). *Gava Media., Yogyakarta.*

Nazir, M. (2003). Metode Penelitian Cetakan Kelima. *Jakarta: Ghalia Indonesia.*

Pasolong, H. (2014). *Teori administrasi publik.* Alfabeta Bandung.

Sedarmayanti, M. (2001). Sumber daya manusia dan produktivitas kerja.
Bandung: CV. Mandar Maju.

Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif.*

Susanto, A. (2007). Sistem Informasi Manajemen, Lingga Jaya. *Bandung. PT.
Elex Media Komputindo, Jakarta.*

Terry, G. R., Rue, L. W., & Ticoalu, G. A. (1992). Dasar-dasar Manajemen. *Bumi
Aksara.*

Umar, H. (2005). Desain Penelitian. *Jakarta: Salemba Empat.*

Jurnal dan Skripsi :

Anggoro, D. W. A. S. (2017). *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik
Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Adimulyo Kabupaten
Kebumen.* Universitas Negeri Semarang.

Anwaruddin, A. (2004). Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal
Ilmu Administrasi, 1(2).*

- Aprilisyana, N. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Kearsipan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung*.
- Ardani, M. C. (2018). Analisis Inovasi Aji Arum (Akta Jadi Antar Rumah) Oleh Dispendukcapil Kabupaten Semarang. *Jurnal of Publik Policy and Management Riview*, 8.
- Chasanah, N. (2008). *Analisis Pengaruh Empowerment, Self Efficacy dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Empiris pada Karyawan PT. Mayora Tbk Regional Jateng dan DIY)*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Dwimawanti, I. H. A. N. R. (n.d.). Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan IMB Di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Erdina, T. V., & Hariani, D. (2017). Analisis Efektivitas Organisasi Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3).
- Fahmi, A. (2019). *Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Implementasi Dana Desa di Desa Wringinjajar*. Faculty of Social and Political Sciences.
- Maulida, D. (2019). Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan.
- Medy, A. D. (2019). *Efektivitas Pemberian Insentif Kepada Tenaga Pendidik*

- Keagamaan Non Formal Madrasah Diniyah (MADIN) di Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Semarang*. Faculty of Social and Political Sciences.
- Merlambang, G. (2019). *Efektivitas Program Dalam Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung*. Universitas Pasundan.
- Pitriani, L. (2018). *Efektivitas Pelayanan Administrasi Pertanahan Menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Putri, A. N. (2018). *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Sukajadi)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rosellasari, S. B. (2019). *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Mengenai Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Utara)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Sari, D. A. D. (2013). *Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep)*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 53(9), 1–13.
- Tang, M. (2018). *Analisis Penerbitan Perizinan Penyelenggaraan Toko Obat Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru*. 1.

Terry, G. R., Rue, L. W., & Ticoalu, G. A. (1992). Dasar-dasar Manajemen. *Bumi Aksara*.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Website :

Alur Proses Pelayanan Perizinan (<http://ptspblora.com/sop-layanan/> diakses pada tanggal 5 Mei)

Republik Indonesia. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. (2019). Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) (<http://oss.go.id> diakses pada tanggal 5 Mei)

<https://bpsdmd.jatengprov.go.id/eproper/cetakinovasi/index.pdf.php./nourut=293>

(Diakses 29 November 2021 Pukul 13.10 WIB)

<https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2670/menggenjot->

[peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia](https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2670/menggenjot-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia) (Diakses 29 November 2021 Pukul 13.20 WIB)